

BAB V

KESIMPULAN

Permasalahan yang terjadi antara Tiongkok dan Taiwan telah berlangsung selama 70 tahun lamanya. Berawal dari terjadinya Perang Saudara pada tahun 1927 hingga 1949 antara Partai Komunis Tiongkok (PKT) yang dipimpin oleh Mao Zedong dan Partai Nasionalis Kuomintang (KMT) yang dipimpin oleh Chiang Kai-Shek. Perang tersebut terjadi karena kedua partai sama-sama ingin menjadi penguasa di wilayah Tiongkok yang kemudian dimenangkan oleh Mao Zedong sehingga membuat PKT berhasil menguasai wilayah Tiongkok yang pada saat itu masih berdiri Republik Tiongkok di bawah pemerintahan nasionalis. PKT yang menang perang kemudian mendirikan Republik Rakyat Tiongkok pada tanggal 10 Oktober 1949.

Kekalahan KMT terhadap PKT membuat mereka tidak memiliki tempat di wilayah Daratan Tiongkok dan memilih berpindah ke Taiwan yang pada saat itu masih bernama Pulau Formosa dan membangun pemerintahan darurat sementara disana karena meskipun mengalami kekalahan, Chiang masih berusaha untuk merebut kembali wilayah Tiongkok dari tangan komunis. Namun, usaha yang beberapa kali dilakukan oleh Chiang dan pasukannya selalu digagalkan oleh pihak komunis. Sehingga, hal ini membuat Chiang menyerah dan lebih berfokus untuk menjalankan pemerintahan nasionalis disana dengan membangun Republik Tiongkok dengan pusat pemerintahan di Taipei. Adanya kekuasaan pemerintahan nasionalis yang dipimpin oleh Chiang Kai-Shek di Taiwan, menjadikan pulau tersebut memutuskan hubungan dengan Tiongkok karena dikuasai oleh pemerintahan komunis. Taiwan juga tidak mengakui sebagai bagian dari Republik Rakyat Tiongkok karena merasa belum pernah menjadi bagian dari RRT yang dipimpin oleh komunis. Taiwan memang pernah bergabung dengan Tiongkok tetapi

Tiongkok yang dimaksud adalah Republik Tiongkok yang didirikan pada tahun 1912 oleh Sun Yat Sen yang berasal dari KMT.

Sikap Taiwan ini sangat menentang bagi Tiongkok yang dipimpin oleh komunis karena bagi Tiongkok, Taiwan merupakan wilayah kedaulatannya dan sudah ada sejak dulu. Meskipun disana berdiri pemerintahan nasionalis dengan membangun kembali Republik Tiongkok, bagi pihak komunis di Daratan Tiongkok, hal ini tidak mengubah status Taiwan sebagai wilayah mereka karena belum ada sebuah perjanjian resmi yang mengakhiri Perang Saudara diantara PKT dan KMT sehingga tidak ada sesuatu yang secara resmi membuat Taiwan berpisah dari Tiongkok. Dengan memiliki pendapat masing-masing mengenai status Taiwan, membuat para pemimpin baik Tiongkok dan Taiwan menyikapi hal ini dengan cara yang saling menentang satu sama lain yang tentu saja berpengaruh terhadap hubungan keduanya. Pengaruh ini telah membawa hubungan keduanya selalu konfliktual dan telah berlangsung hingga sekarang.

Untuk membuat Taiwan mengakui sebagai bagian dari wilayah kedaulatan Tiongkok, Negara yang sering dikenal sebagai Negeri Tirai Bambu ini kemudian mengusung reunifikasi diantara keduanya. Reunifikasi yang dimaksud adalah menyatukan kembali Taiwan dengan Tiongkok dan Taiwan harus mengakui Republik Rakyat Tiongkok sebagai negaranya. Dengan reunifikasi, akan menciptakan perdamaian di Selat Taiwan (selat yang memisahkan Tiongkok Daratan dengan Taiwan). Upaya reunifikasi ini sudah ada sejak Mao Zedong (pemimpin generasi pertama Republik Rakyat Tiongkok) masih berkuasa hingga pemimpin generasi kelima yaitu Xi Jinping.

Xi Jinping sebagai pemimpin terakhir Republik Rakyat Tiongkok yang pertama kali menjabat pada tahun 2012 dikenal sangat ambisius dan otoriter, sangat menginginkan Taiwan untuk kembali menyatu ke tanah air karena baginya

Taiwan masih merupakan wilayah kedaulatannya dan menganggap wilayah tersebut sebagai provinsi yang membangkan, sehingga, hal ini membuat ia berusaha untuk mewujudkan reunifikasi antara Tiongkok dan Taiwan. Xi kemudian melakukan berbagai upaya untuk mencapai reunifikasi dengan menggunakan cara-cara damai yang dikenal dengan *peaceful reunification*. Hal ini dilakukan oleh Xi secara bertahap dan melanjutkan dari upaya reunifikasi yang dilakukan oleh pemimpin Tiongkok sebelumnya.

Ada pun upaya-upaya yang dilakukan Xi dalam mewujudkan reunifikasi yaitu pertama, ia mempererat hubungan kerjasama ekonomi antara Tiongkok dengan Taiwan. Melalui kerjasama ekonomi akan membuat Taiwan semakin ketergantungan terhadap Tiongkok karena kerjasama ini memberikan pengaruh yang besar terhadap pendapatannya sehingga hal ini akan mendorong Taiwan lebih dekat dengan reunifikasi yang dirancang oleh Tiongkok. Kedua, Xi menegaskan kembali Konsensus 1992 yang mengarah kepada *One China Principle*. *One China Principle* merupakan sebuah prinsip dimana mengakui Republik Rakyat Tiongkok sebagai satu-satunya pemerintah yang sah di wilayah Tiongkok dan Taiwan merupakan bagian dari Republik Rakyat Tiongkok. Melalui prinsip ini akan menegaskan hubungan antara Tiongkok dengan Taiwan sebagai hubungan pemerintah pusat dan daerah.

Selain itu, Tiongkok juga menggunakan konsensus 1992 dengan membuat *One China Policy* untuk mengisolasi Taiwan dari dunia internasional. Ketiga, Tiongkok membuat proposal “Satu Negara Dua Sistem”. Bersatu kembalinya Taiwan dengan Tiongkok akan menjadikan Taiwan sebagai Daerah Administratif Khusus sehingga Taiwan bisa bebas memerintah wilayahnya sendiri seperti sebelumnya. Keempat, Tiongkok menyerukan ancaman militer terhadap Taiwan. Tiongkok mengancam akan menggunakan kekuatannya untuk menyerang Taiwan jika Taiwan terus berusaha untuk menjadi sebuah negara yang berdaulat dan tidak bekerjasama dengan

baik untuk menciptakan terwujudnya reunifikasi dengan Tiongkok.

Meskipun Tiongkok telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan reunifikasi dengan Taiwan, sampai sekarang belum ada titik keberhasilan yang dicapai oleh Tiongkok. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam mewujudkan reunifikasi diantaranya terdapat perbedaan ideologi politik antara Tiongkok dan Taiwan. Tiongkok yang menganut ideologi komunis menjadikannya sebagai negara yang otoriter. Sedangkan Taiwan yang menganut paham demokrasi sehingga menjunjung tinggi kebebasan. Tentu saja perbedaan ideologi politik ini memberikan pengaruh besar terhadap terhambatnya reunifikasi diantara Tiongkok dan Taiwan karena keduanya berlawanan antar satu sama lain. Meskipun Tiongkok menganggap hal ini bukan menjadi masalah besar karena Taiwan dapat mempertahankan ideologinya melalui reunifikasi dibawah model “Satu Negara Dua Sistem”, bagi Taiwan ideologi demokrasi tidak dapat berdiri dibawah pemerintahan komunis sebagaimana apa yang terjadi pada Hong Kong saat ini menunjukkan bahwa gagalnya model “Satu Negara Dua Sistem” yang membuat Taiwan khawatir ketika menyatu dengan Tiongkok maka akan mengancam bagi demokrasi Taiwan.

Faktor lain yang memberikan pengaruh besar terhadap terhambatnya Tiongkok dalam mewujudkan reunifikasi dengan Taiwan yaitu sikap Taiwan yang lebih memilih menjadi negara yang berdaulat. Bagi Taiwan, dengan adanya sejarah masa lalu yang tidak baik, mereka sudah bukan merupakan bagian dari Tiongkok sehingga Taiwan lebih memilih berdiri sendiri sebagai negara yang independen. Selain itu, adanya tuntutan baik dari elit maupun publik Tiongkok untuk menjadikan Taiwan sebagai negara yang berdaulat seutuhnya tanpa adanya pengaruh dari Tiongkok membuat Taiwan tidak menginginkan bergabung dengan

Tiongkok. Sehingga, hal ini membuat Tiongkok mengalami hambatan dalam mewujudkan reunifikasi diantara keduanya.